

**PERJUANGAN KELOMPOK TANI INTERNASIONAL
DALAM MELAWAN PROGRAM LIBERALISASI PERTANIAN GLOBAL**

(Studi tentang perlawanan *La Via Campesina* terhadap program liberalisme pertanian WTO)

Adi Joko Purwanto

Staf Pengajar Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fisip, Unwahas

Email: addydocument@gmail.com

Abstract

The agricultural sector is the most sensitive sectors both domestic and International politics. Since trade liberalization began and banner proclaimed, the central sector of life for most people in developing countries, is also covered and for liberalization. This paper describes an international social movement resistance (La Via Campesina/ international peasant movement) in the struggle against global agricultural liberalization program run by World Trade Organization (WTO). In conducting the study, researchers used qualitative methods. This method is particularly relevant because it can answer the problem and qualitative research are better able to get in on a deeper exploration. The facts and the cases raised in the field of qualitative research is not as dead but moving data and dialectical in a more complex history.

Keywords : *Neo-Liberalism, Agricultural liberalization, Social Movement, International peasant movement, La Via Campesina, World Trade Organization (WTO).*

"Melalui La Via Campesina kita belajar bahwa kita bukan satu-satunya yang sedang berjuang. Globalisasi telah berarti pemiskinan mayoritas komunitas. Namun kita tetap perlu mengglobalkan perjuangan untuk keadilan, keberlangsungan dan pembangunan komunitas-komunitas. Kita perlu mengglobalkan perjuangan ini di komunitas-komunitas termiskin di mana saja."

Servando Olivarria Saavedra

A. Pendahuluan

Liberalisasi memang bukanlah konsep baru dalam kajian ekonomi politik internasional. Adam Smith, dalam teori "*absolute advantage*" (1776), telah mengawali kajian ini sejak berabad-abad silam. Perdagangan internasional bisa saling menguntungkan. Spesialisasi, pembagian kerja dan perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. David Ricardo, dan teori "*comparative advantage*" (1817), Menyampaikan walaupun satu negara bisa menghasilkan kedua komoditi dengan lebih murah daripada yang lain, perdagangan tetap bisa berlangsung dan menguntungkan kedua belah pihak kalau masing-masing negara memiliki "keunggulan komparatif", yaitu keunggulan masing-masing lebih besar di satu produk daripada di produk yang lain.

Konsepsi *Laissez-Faire*, dalam kebijakan ekonomi domestik merupakan sebuah konsep tanpa intervensi dari negara atau pemerintah. Pembatasan keterlibatan negara ini dimaksudkan untuk mengurangi proteksi perdagangan dan pajak yang tinggi, sehingga mobilitas barang dan jasa dunia sangat terbatas. Gagasan ini sangat dominan pada abad 19. Tuntutan liberalisasi perdagangan pada berbagai sektor mulai berkembang terutama di Inggris melalui peraturan perdagangan gandum. Pada dekade 1980an tuntutan liberalisasi mulai di degungkan seiring dengan berkembangnya neoliberalisme, dan dijadikannya gagasan ini sebagai landasan utama institusi internasional yang berkaitan dengan perdagangan dan moneter internasional, lembaga-

lembaga finansial internasional seperti halnya IMF, WTO, dan Bank Dunia.¹

Perdagangan bebas yang merupakan bagian dari globalisasi ekonomi telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan di dunia termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai produk andalan negara berkembang secara tidak langsung turut serta mengikuti arus globalisasi dan perdagangan bebas. Atas nama kebijakan perdagangan bebas inilah seluruh anggota WTO (*World Trade Organization*), diwajibkan menyepakati perjanjian liberalisasi pertanian yang dikenal dengan nama *AoA (Agreement on Agriculture)*.² Liberalisasi pertanian *AoA* sesungguhnya berangkat dari keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara membuat negara-negara maju bisa mendapatkan produk yang lebih murah sementara pada saat yang bersamaan negara-negara berkembang bisa meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, terutama petani, dengan cara melakukan ekspor ke negara-negara maju. Meskipun secara teoritis atau rumusan di atas kertas pada *Agreement on Agriculture*-nya WTO disebutkan "*fair trade*" bukan "*free trade*", tapi pada implementasinya tetap saja ada unsur ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh negara-negara berkembang.

Gencarnya arus liberalisasi yang dihembuskan oleh institusi kapitalis dunia, WTO, dengan menyebarkan ide bahwa liberalisasi adalah jalan menuju

¹ I. Robinson, William, "*Capitalist Globalization and The Transnationalization of The State*" dalam, Richard Little and Michael Smith, "*Perspectives on World Politic; Third Edition* , Routledge, New York, USA, 2006. Hal.264

² http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 00.57wib

kemakmuran,³ tidak bisa dibendung oleh negara-negara berkembang. Kontroversi antara kelompok pro dan kontra terhadap gelombang liberalisasi menjadi sebuah polemik berkepanjangan yang tidak pernah ada titik temunya. Secara perlahan namun pasti, ide-ide liberalisasi mulai memasuki tubuh pemerintahan negara-negara berkembang. Neo-Liberalisme memang telah menjadi ancaman strategis bagi mata pencarian dan kehidupan petani miskin dan tak bertanah, tenaga kerja upahan dan petani kecil baik dinegara-negara selatan maupun utara. Kegiatan pembangunan ekonomi yang berlandaskan Noe-Liberalisme cenderung merampas hak petani kecil dan masyarakat atas tanah. Petani sendiri tak berdaya untuk melakukan pembelaan, sehingga kehidupan mereka semakin termarginalisasi atau bahkan tersingkirkan dari “habitat” mereka sendiri. Kecenderungan seperti merupakan akibat gabungan kebijakan pemerintah suatu negara dalam kerangka kerjasama internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana Perlawanan kelompok tani Internasional (*La Via Campesina*) terhadap program liberalisasi pertanian global (WTO)?”

C. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua buah konsep yaitu liberalisasi ekonomi dan gerakan sosial. **Pertama**, Konsep liberalisasi ekonomi. Secara umum liberalisasi ekonomi

dipahami sebagai bentuk pembebasan pasar dari segala regulasi maupun kondisi-kondisi yang dapat menghalangi aktivitas aktor-aktor didalamnya. Yang dimaksud dengan regulator pasar adalah negara. Melalui hukum dan kekuasaan yang dimilikinya, negara dapat melakukan berbagai tindakan yang menghambat bekerjanya mekanisme pasar. Pemikir liberal seperti halnya Milton Friedman dan Frederick Von Hayek meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif daripada yang bisa dilakukan negara, dan bahwa pemerintah yang berusaha menanggulangi kegagalan pasar lebih merugikan daripada menguntungkan.⁴

Konsep liberalisme ekonomi yang menjadi *mainstream* dari struktur ekonomi-politik global meliputi, pentingnya pasar persaingan sempurna (pasar bebas), minimalnya (bahkan hilangnya) peran negara dalam mengintervensi logika pasar, prioritas pada pertumbuhan ekonomi, dan pemotongan anggaran publik (subsidi), dan integrasi penuh ekonomi domestik kedalam mekanisme ekonomi global, turut memberikan andil penting terhadap hilangnya kemandirian negara dalam mengelola perekonomiannya, termasuk sektor pertanian bagi negara-negara miskin dan berkembang (yang juga sebagian besarnya menekankan formasi ekonominya pada sektor agraris). Dalam banyak kasus, mekanisme *AoA* (*Agreement on Agriculture*) sebagai bagian dari liberalisasi pertanian yang tertuang dalam WTO justru membuat kebanyakan negara-negara berkembang kehilangan kendalinya atas pengelolaan

³ Sterling-Folker, Jennifer, “*Liberal Approaches in Making Sense of International Relations Theory*”, Lynne Rienner Publisher, Inc, USA, 2006. Hal.56

⁴ Hertz, Norena, *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global Dan Matinya Demokrasi*, Edisi Terjemahan, Alenia, Yogyakarta, 2005. Hal. 9

pertanian bahkan tak jarang mereka dipaksa untuk membuka seluas-luasnya pasar domestiknya dan menghilangkan subsidi pertanian (sebagai hambatan non-tarif) dalam perdagangan global, sementara disisi lain negara-negara maju justru bersikap sangat protektif terhadap produksi pertanian dalam negerinya.

Kedua, Konsep gerakan sosial. Gerakan sosial biasanya didefinisikan sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat yang terorganisir tetapi informal bersifat lintas kelompok untuk menentang atau mendesakkan perubahan. Ciri sebuah gerakan sosial, menekankan pentingnya empat unsur utama, yaitu (1) jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dll. (2) Ada *sharing* keyakinan dan solidaritas di antara mereka; (3) ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu; (4) Aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi.⁵ Selain itu *social movement* adalah bentuk reaksi defensif untuk mempertahankan ruang publik dan privasi, sekaligus menentang proses hegemoni yang dilakukan oleh sistem Negara dan ekonomi pasar. Lebih lanjut, *social movement*, berfungsi untuk melakukan *counter* terhadap ideologi dominan yang menggunakan logika matematis sebagai dasar rasionalitasnya,

⁵ Suaedy, Ahmad "Islam dan gerakan Sosial Baru di Indonesia; Sebuah pencarian perspektif dan agenda riset" dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/gersos_islam.html. diakses pada 17 desember 2012 00.57wib

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

seperti yang dianut oleh ideologi neo-liberalisme.

Dengan demikian, bisa diidealkan bahwa gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya. Meskipun selalu dibutuhkan kepemimpinan di dalam semua gerakan sosial tersebut, tetapi keuntungan (*value-added*) dan capaiannya selalu harus kembali kepada konstituen gerakan dan bukan kepada pemimpinnya.⁶ Gerakan tani internasional yang dikenal dengan *La Via Campesina* sebagai sebuah gerakan alternatif *counter-hegemony* telah menjadi sebuah gerakan internasional yang *massive* dalam memperjuangkan sebuah gagasan besar yaitu kesejahteraan petani di negara-negara berkembang dan melawan institusi yang identik dengan neo-liberalisme seperti *World Trade organization* (WTO)

D. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Cassel dan Simon, metode kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menitik beratkan pada proses penggalan data-data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis dan terucapkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif adalah berusaha untuk mendapatkan data-data menyeluruh tentang situasi yang sedang dipelajari oleh peneliti.⁷

⁶ *ibid*

⁷ R. Bogdan and SJ Tylor (eds), *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, Wiley, 1975 Dalam Veronika Sintha Saraswati *Korporasi Militer Swasta dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

E. Pembahasan

WTO dan liberalisasi Pertanian

Peningkatan integrasi antar negara dapat dilihat melalui adanya perkembangan dalam arus penyeberangan barang, jasa dan juga modal dari suatu negara ke negara lain. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)
2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS)
3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs)
4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)

Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini:

- 🌐 Pertanian
- 🌐 *Sanitary and Phytosanitary/ SPS*
- 🌐 Badan Pemantau Tekstil (*Textiles and Clothing*)
- 🌐 Standar Produk
- 🌐 Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)
- 🌐 Tindakan anti-dumping
- 🌐 Penilaian Pabean (*Customs Valuation Methods*)
- 🌐 Pemeriksaan sebelum pengapalan (*Preshipment Inspection*)
- 🌐 Ketentuan asal barang (*Rules of Origin*)
- 🌐 Lisensi Impor (*Imports Licencing*)
- 🌐 Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Subsidies and Countervailing Measures*)
- 🌐 Tindakan Pengamanan (*safeguards*)

Prinsip-prinsip Sistem Perdagangan Multilateral adalah sebagai berikut:

SPEKTRUM
Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

1. MFN (*Most-Favoured Nation*): Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang, Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.
2. Perlakuan Nasional (*National Treatment*). Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.
3. Transparansi (*Transparency*), negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁸

Tidak sama dengan sektor lainnya, sektor pertanian merupakan bidang yang multidimensional. Pertanian tidak hanya menyentuh kepentingan ekonomi dan perdagangan. Bagi negara-negara berkembang, sektor ini mencakup pula persoalan-persoalan sosial-kultural. Bahkan bagi negara seperti Indonesia, pertanian (terutama beras) adalah persoalan hidup-mati. Liberalisasi pertanian merupakan isu penentu bagi seluruh negara anggota WTO untuk membuka diri bagi perundingan di sektor lain. Akibatnya, agenda pertanian menjadi pembahasan paling alot dan sulit mencapai titik temu.

⁸http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 01.21wib

Pembahasan tentang liberalisasi pertanian disepakati melalui perjanjian *Agreement on Agriculture* (AOA) pada tahun 1995.⁹ *Agreement on Agriculture/AoA* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Pada prinsipnya, tujuan AOA adalah untuk memperluas liberalisasi perdagangan di bidang pertanian dan secara bertahap mengurangi distorsi perdagangan dengan menerapkan aturan main GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Menurut ketentuan GATT, jenis proteksi yang bersifat kuantitatif tidak diperbolehkan. Proteksi harus diterapkan secara non-diskriminasi sesuai azas *most favoured nation treatment*.

Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif semua itu tidak lain diarahkan untuk memuluskan upaya-upaya liberalisasi secara legal. Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment – S&D*) bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut serta yang utamanya adalah

⁹ Lihat Winner Agung Pribadi, "Unfair Trade Dalam Free Trade: Standar Ganda Negara Maju Dalam Penerapan *Agreement On Agriculture (AOA) WTO*", Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume II No. 1 Mei, 2005. Bahan Mata Kuliah Ekonomi Politik Global "Indonesia dan Liberalisasi Pertanian", Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

menghilangkan praktek keterlibatan negara dalam perdagangan produk pertanian.

Penerapan AOA meliputi hal-hal. **Pertama**, kemudahan akses pasar, Aspek utama dari perubahan yang fundamental ini adalah stimulasi terhadap investasi, produksi dan perdagangan produk pertanian melalui: (i) akses pasar produk pertanian yang transparan, prediktabel dan kompetitif, (ii) peningkatan hubungan antara pasar produk pertanian nasional dengan pasar internasional, dan (iii) penekanan pada mekanisme pasar yang mengarahkan penggunaan yang paling produktif terhadap sumber daya yang terbatas, baik di sektor pertanian maupun perekonomian secara luas. Selanjutnya adalah mengilangkan hambatan perdagangan berupa pajak yang tinggi dan tariff impor baik Negara industri maju maupun Negara berkembang. NIM akan memotong tariff tertinggi diluar batas kuota sampai rata-rata 36 % secara bersamaan dengan jangka waktu 6 tahun, sedangkan Negara berkembang sebanyak 24% selama 10 tahun.¹⁰ Sementara Negara miskin tidak harus memotong tarifnya.

Kedua, subsidi sektor pertanian melarang subsidi ekspor pada produk pertanian kecuali subsidi yang ditetapkan dalam spesifik *list of commitments* (daftar komitmen). Selanjutnya negara-negara maju sepakat untuk mengurangi nilai subsidi ekspor sebesar 36% selama enam tahun yang dimulai pada tahun 1995 dan 24% selama 10 tahun untuk negara-negara berkembang. Selain itu negara-negara maju juga sepakat untuk mengurangi jumlah ekspor bersubsidi sebesar 21% selama enam tahun dan 14% selama 10

¹⁰http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 01.44wib

tahun untuk negara-negara berkembang.¹¹ Selama periode pelaksanaan enam tahun, negara-negara berkembang diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk menggunakan subsidi untuk mengurangi biaya pemasaran dan pengangkutan ekspor.

Ketiga, dukungan domestik berupa perlindungan pasar dalam negeri dari over produksi. Kebijakan domestik yang memiliki efek langsung terhadap produksi dan perdagangan harus dipotong.. Negara-negara maju sepakat untuk mengurangi angka sebesar 20% selama enam tahun yang dimulai pada tahun 1995. Negara-negara berkembang sepakat untuk melakukan pengurangan 13% selama 10 tahun. Subsidi Domestik dalam sektor Pertanian:

- a. Amber Box, adalah semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan;
- b. Blue Box, adalah amber box dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Subsidi yang biasanya dikategorikan sebagai Amber Box akan dimasukkan ke dalam Blue Box jika subsidi tersebut juga menuntut dikurangnya produksi oleh para petani; dan
- c. Green Box, adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau walaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga.

Berkaitan dengan kebijakan yang diatur dalam Green Box terdapat tiga jenis subsidi lainnya yang dikecualikan dari komitmen penurunan subsidi yaitu kebijakan pembangunan tertentu di negara berkembang, pembayaran langsung pada program pembatasan produksi (blue box), dan tingkat subsidi yang disebut de minimis.¹²

La Via Campesina dan Gerakan Tani Internasional

Sebelum *La Via Campesina* berdiri pada tahun 1993, Salah satu gerakan perlawanan yang sangat aktif untuk memperjuangkan hak-hak petani adalah gerakan kaum tani tak bertanah pedesaan di Brazil (*Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terrel / landless Workers Movement*), yang lebih dikenal dengan 'MST',¹³ adalah salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah Amerika Latin. Bahkan dapat dibilang salah satu gerakan akar rumput paling berhasil di dunia. Ratusan ribu petani dan keluarganya berjuang untuk mendapatkan tanah. Sampai sekarang sekitar 250 ribu keluarga dari MST memenangkan hak ambil alih atas tanah mereka yang luasnya 15 juta hektar.¹⁴ Selain Brazil, gerakan ini juga muncul diberbagai negara yang ada sepereti Argentina, Ekuador, Bolivia, Peru, Kolombia, Amerika Tengah, Paraguay dan Mexico maupun diluar dari kawasan tersebut seperti perjuang petani di India dan perjuangan petani di Indonesia.¹⁵

¹² ibid

¹³http://www.globalautonomy.ca/global1/glossary_en/try.jsp?id=OR.0011. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 01.21wib

¹⁴ Coen Husain Pontoh, "Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global", Resist, Yogyakarta, 2005. hal. 21

¹⁵ Lihat, James Petras, "strategi-strategi perjuangan: sentralisasi gerakan tani di Amerika Latin" <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=3706> diakses tgl 9 Desember 2008. Bahan Mata Kuliah Ekonomi Politik

¹¹ ibid

Namun semua organisasi ini tidak berjalan dengan mulus atau lancar sesuai apa yang diinginkan sebab pihak-pihak yang ditentang tidak tinggal diam dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan dari gerakan perlawanan ini. Gerakan ini akan selalu ditekan dan bahkan diintimidasi ataupun diteror dengan berbagai cara. Persepsi dan pengalaman nyata atas ancaman yang telah menggusar banyak organisasi di sektor pedesaan yang terpinggirkan kemudian membentuk suatu organisasi gerakan transnasional yang bernama ***La Via Campesina***. Organisasi ini dibentuk untuk memperjuangkan cara pandang dan kehidupan petani. Dipelepori oleh gerakan petani di Amerika Tengah, Selatan dan Utara, serta kelompok petani di Eropa, *La Via Campesina* dibentuk secara formal pada tahun 1993.¹⁶

Saat ini, *La Via Campesina* menyatukan lebih dari seratus organisasi nasional dan sub-nasional dari Amerika Latin, Amerika Utara, Asia, Karibia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa yang menolak neo-liberalism dan mendorong pembangunan pedesaan yang berbasis hak lokal yang pro kaum miskin serta demokratisasi yang lebih luas.¹⁷ Organisasi ini secara ideologis merupakan koalisi yang otonom dan plural. *La Via Campesina* merupakan aktor sekaligus arena tempat bertindak. Walaupun didominasi oleh kelompok-kelompok dari Amerika dan Eropa, *La Via Campesina* yang mengklaim bersifat global dan populer telah menjadi aktor utama dalam perjuangan transnasional terhadap neo-liberalisme, menuntut

akuntabilitas dari instansi antar pemerintah, menolak dan menentang penguasaan perusahaan atas sumber daya alam dan teknologi, dan mengadvokasi kedaulatan atas pangan, serta berbagai isu lainnya. Semuanya tergambar jelas dalam berbagai kampanye politik seperti menentang WTO, perusahaan global raksasa seperti McDonalds dan perusahaan yang memodifikasi organisme secara genetic (GMOS) beserta perusahaan-perusahaan transnasional yang mendukungnya seperti Monsanto.

Konsep gerakan dari *La Via Campesina* adalah gerakan *Social Movement* dimana gerakan ini muncul dan dibentuk bukan oleh pemerintah namun oleh masyarakat yang merasa tertindas dan terhisap serta ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu pemerintah yang menganut paham Neo-Liberalisme serta antek-anteknya. Gerakan *La Via Campesina* ini sejalan dengan konsep gerakan sosial yang dikemukakan oleh Gramsci "Gerakan sosial sebagai *counter-hegemony*; sebuah perlawanan yang berangkat dari adanya krisis hegemoni kelas penguasa, yang terjadi akibat kegagalan kelas penguasa menjalankan kebijakan politiknya, ataupun secara sengaja dicabut kekuasaannya oleh persetujuan massa, atau akibat terkumpulnya sejumlah massa terutama kaum petani atau intelektual borjuis yang secara tiba-tiba bangkit dari kepasifan politiknya". Selanjutnya gerakan tersebut memunculkan apa yang disebut '*war of position*'; upaya untuk mengenyahkan ideologi, norma, mitos, politik dan kebudayaan kelas berkuasa ketimbang menyerang secara fisik. Proses transformasi kultural yang menyerang hegemoni kelas dominan (*counter-hegemony*) melalui sebuah 'blok historis' (sebuah aliansi besar yang

Global, "Gerakan Liberalisasi di Amerika Latin", Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

¹⁶<http://viacampesina.org/en/index.php/organisation-mainmenu-44> diakses pada 17 Desember 2012 pukul 01.21 wib

¹⁷ *ibid.*

didalamnya melibatkan kekuatan buruh beserta kelompok subordinat lainnya).¹⁸

Dari konsep yang ada inilah yang kemudian membuat gerakan dari *La Via Campesina* menjadi lebih berkembang serta memperluas jaringan agar dorongan atau keinginan untuk membuat suatu perubahan terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan dapat terwujud dan didengar oleh masyarakat internasional atas ketidakadilan yang diberikan oleh para penguasa lokal maupun internasional terhadap kaum tani.

Tujuan Gerakan *La Via Campesina*

Tujuan *La Via Campesina* yaitu untuk mengalahkan kekuatan neo-liberalisme dan untuk mengembangkan suatu alternatif. Hal ini menjelaskan pendirian *La Via Campesina* yang konfrontatif terhadap lembaga keuangan internasional (IMF, World Bank) yang dianggap sebagai alat utama neo-liberalisme. Bagi *La Via Campesina*, "tujuannya adalah meruntuhkan legitimasi lembaga-lembaga tersebut dan mengurangi pengaruh mereka. *La Via Campesina* tidak terlibat dalam dialog atau proses konsultasi dengan lembaga-lembaga itu karena upaya tersebut tidak menghasilkan perubahan positif apapun dan hanya akan semakin mengesahkan peran mereka.

Dengan demikian, agenda-agenda utama *La Via Campesina* (ketahanan pangan, pembaruan agraria, dll.) harus ditangani dalam kerangka kerja alternatif yang demokratis. Nilai-nilai yang paling mendasar dari tujuan *La Via Campesina* adalah keberagaman, solidaritas, kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Dengan nilai-nilai ini

kemudian *La Via Campesina* menuntut/mengklaim bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang sangat beragam namun mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya serta mempunyai kesetaraan tanpa ada perbedaan serta mendapat pemberlakuan yang adil tanpa harus memandang apapun/sipapun serta menerapkan nilai-nilai yang demokratis dalam kesehari-harian.

Tujuan lain dari gerakan *La Via Campesina* ini adalah menekankan tujuh isu utama keluarga petani di seluruh dunia:

1. kedaulatan pangan dan perdagangan pertanian,
2. keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik,
3. hak-hak buruh tani migran,
4. kesetaraan gender,
5. reforma agraria,
6. hak asasi manusia di pedesaan,
7. serta pertanian berkelanjutan berbasis petani kecil.¹⁹

Tujuh isu ini merupakan tuntutan dari *La Via Campesina* dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan hak asasi dasar manusia, "kedaulatan pangan" menjadi jantung model pembangunan pedesaan yang berpusat pada petani ala *La Via Campesina*. *La Via Campesina* yakin bahwa kedaulatan pangan hanya dapat dicapai melalui reforma agraria, yang menjamin agar petani, petani skala kecil, masyarakat adat, dan perempuan pedesaan memiliki akses dan kontrol lebih besar terhadap sumber daya produktif. Kedaulatan pangan tidak bertentangan dengan perdagangan pertanian, tetapi kedaulatan pangan

¹⁸ Gramsci, Antonio "Social Movement On View", dalam Muhadi Sugiono dan Diah Kusumaningrum Kuliah Kosmopolitanisme dan Norma Internasional ; *Social Movement* , Jumat 12 Desember 2008

¹⁹ <http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27> diakses pada 16 Desember 2012 pukul 01.21

memprioritaskan produksi lokal untuk konsumsi lokal.²⁰

Gerakan Perlawanan *La Via Campesina* Terhadap WTO

Liberasasi pertanian yang dicanangkan *World Trade Organization* (WTO) dianggap merugikan petani-petani di negara berkembang. "Kebijakan pasar bebas WTO menguntungkan perusahaan-perusahaan besar asing dan merugikan petani-petani negara berkembang yang kurang bisa bersaing," sekilas bisa dilihat bahwa dengan liberalisasi pertanian ini, ada kepentingan tersembunyi dari negara-negara besar yang terlibat dalam WTO. "Perundingan-perundingan di WTO sangat didominasi Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Kanada. Bahkan negara-negara tersebut mempunyai ruang tersendiri untuk menekan negara lain agar mengikuti kesepakatan yang dirancangnya. Produk pertanian dari petani-petani di negara berkembang kalah bersaing dengan komoditi pertanian impor dari luar negeri. Hal ini karena teknologi, luas lahan dan modal yang dimiliki petani tersebut rendah. Setiap negara yang menjadi anggota WTO, menandatangani kesepakatan untuk menghapuskan subsidi di bidang pertanian, tarif impor dan membuka pasarnya secara bebas.

Dengan konsep liberalisasi pertanian ini kemudian memicu aksi protes besar-besaran di kota Eldorado dos Carajós, Brazil, yang menuntut agar tanah pertanian dikembalikan kepada rakyat beserta pengelolaannya dan bukan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan besar yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat kecil. Aksi protes ini

kemudian mengakibatkan bentrokan massal antara aparat keamanan dan rakyat setempat, yang menewaskan 19 petani dan 60 orang luka berat, yang terjadi pada tanggal 17 April 1996.²¹ Tragedi tersebut melahirkan gerakan rakyat di Brasil dalam bendera *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST), semacam gerakan rakyat tak bertanah yang gencar memperjuangkan reforma agraria atas inisiatif rakyat. Gerakan rakyat tak bertanah di Brasil belakangan menginspirasi gerakan tani di berbagai belahan dunia. Sebagai kristalisasi dari kerja konsolidasi lintas negara, kini di tingkat internasional telah terbentuk organisasi gerakan tani bernama *La Via Campesina*.

Momentum yang terjadi pada 17 April 1996 tersebut kemudian dijadikan sebagai hari Tani sedunia, yang hingga hari ini masih diperingati dengan disertakan berbagai macam tuntutan dari program perjuangan yang disuarakan oleh *La Via Campesina* kepada lembaga-lembaga internasional (IMF, World Bank, WTO, PBB, dll) serta untuk diketahui oleh masyarakat dunia. *La Via Campesina* mulai melakukan berbagai macam protes terhadap lembaga-lembaga tersebut hal ini dapat dilihat dari pengajuan programnya sebagai tandingan terhadap "KTT Pangan Dunia", suatu konferensi tentang kelaparan di dunia yang diorganisir oleh PBB pada 1996 dan dihadiri oleh perwakilan resmi dari 158 negara. Dimana para peserta yang terlibat didalam pertemuan itu menjanjikan (dan selanjutnya tidak berbuat apa-apa untuk memenuhinya)

²¹ Lihat, "Liberalisasi Pertanian Rugikan Petani" <http://www.ipb.ac.id/id/?b=264> Bahan Mata Kuliah Ekonomi Politik Global "Indonesia dan Liberalisasi Pertanian", Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

²⁰ *Ibid.*

penghapusan kelaparan dan kekurangan gizi dengan menjamin "keamanan pangan" yang berkelanjutan bagi semua. Dan bertolak belakang dengan apa yang ditawarkan oleh 'KTT Pangan Dunia' yakni keamanan pangan, *La Via Campesina* mengusulkan kedaulatan pangan sebagai alternatif.

Bukan hanya itu, perjuangan *La Via Campesina* juga menuntut agar WTO keluar dari masalah pertanian dan membiarkan masalah pertanian diurus oleh petani lokal. Hal ini sebabkan karena kebijakan WTO dalam hal ini AoA (*Agreement on Agriculture*) sudah sangat mengesampingkan petani kecil dan mementingkan kepentingan modal yang lebih besar. Dan bahkan segala kebijakan AoA tidak pernah mengindahkan keberlangsungan serta kehidupan petani kecil. Kebijakan pangan regresif yang dipaksakan kepada negara miskin oleh Bank Dunia dan IMF dikodifikasi dan dijalankan oleh Kesepakatan dalam Pertanian dari Organisasi Dagang Dunia yang didorong agrobisnis dan berorientasi-ekspor. Hal ini kemudian membuat *La Via Campesina* menuntut supaya AoA dihapuskan, dan negeri-negeri Dunia Ketiga harus memiliki hak untuk secara unilateral membatalkan kebijakan liberalisasi yang dipaksakan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, maupun melalui kesepakatan perdagangan bebas bilateral seperti NAFTA dan CAFTA. Sebab ketika kebijakan ini masih terus dipertahankan dan bahkan dijalan maka tidak heran akan banyak menambah penderitaan bagi petani dan bahkan akan memakan korban jiwa diakibatkan oleh kelaparan. Semua kebijakan dari liberalisasi pertanian ini kemudian dikritik oleh salah satu pemimpin di Amerika Latin yaitu Presiden Cuba Fidel Castro dengan mengatakan bahwa : "*Tidak ada di dunia ini, di peristiwa*

genosida mana pun, di peperangan apa pun, sebegitu banyak orang tewas dalam tiap menit, tiap jam dan tiap hari sebanyak mereka yang tewas oleh kelaparan dan kemiskinan di planet kita." Dan hal ini sejalan dengan apa yang ditulis Karl Marx satu abad lalu : "*Meskipun mendukung perkembangan teknik, sistem kapitalis bekerja secara bertentangan dengan pertanian rasional, Suatu pertanian rasional tidak cocok dengan sistem kapitalis.*"²²

F. Penutup

Gerakan neo-liberalisme yang bertujuan memajukan dan memakmurkan masyarakat dunia melalui institusi-institusi internasional seperti WTO, ternyata dalam praksisnya mendapatkan perlawanan dari sebagian masyarakat internasional. Ide liberalisme bagi sebagian kelompok yang kontra dianggap hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki modal besar atau negara-negara maju dan negara-negara berkembang selain dieksploitasi juga wajib tunduk pada aturan-aturan internasional yang sesungguhnya menguntungkan negara-negara maju.

Bagi gerakan *La Via Campesina* dimana krisis pangan dan usaha pertanian kini sepenuhnya mengkonfirmasi penilaian tersebut. Suatu sistem yang mendahulukan keuntungan setelah kebutuhan manusia telah menggiring jutaan produsen dari lahannya, mengurangi produktifitas tanah sambil meracuni udara dan airnya, dan menyebabkan hampir semilyar orang mengalami kelaparan kronis dan kekurangan gizi. Krisis

²² Lihat, "Krisis Pangan (bagian kedua): *Demonstrasi terbesar kegagalan terbesar historic model kapitalis*" <http://nefos.org/?q=node/9> diakses tgl 9 Desember 2008. Bahan Mata Kuliah Ekonomi Politik Global, "Gerakan Liberalisasi di Amerika Latin", Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

pangan dan krisis pertanian berakar dari sistem yang irasional dan anti-manusia. Untuk memberi makan seluruh dunia, rakyat pekerja di perkotaan dan pedesaan harus bergandengan tangan untuk menyapu bersih sistem tersebut.

Gerakan ini (baik langsung maupun tidak) mendorong terbentuknya norma dalam hubungan internasional. Gerakan *La Via Campesina* untuk memperjuangkan sejumlah nilai yang melibatkan berbagai masyarakat sipil global membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa proses institusionalisasi sedang terjadi, oleh aktor yang bukan negara. Gerakan seperti *La Via Campesina* sudah menyatukan diri sebab sudah begitu banyak banyak gerakan seperti itu dan bahkan mungkin sudah tidak bisa dihitung jumlahnya oleh penulis jika mau dirunut satu persatu, jadi menurut hemat penulis sudah saatnya untuk

menggabungkan semua kekuatan dari setiap gerakan yang ada untuk tidak terjadi sektarianisme dalam gerakan serta dapat mempunyai daya tekan yang kuat (*power*) untuk melawan setiap ketidakadilan yang dirasakan baik oleh Petani, Buruh, Kaum Miskin Kota, Nelayan dan lainnya. Penggabungan ini menurut penulis tidak untuk menyederhanakan semua persoalan hanya agar gerakan seperti ini lebih terkonsolidasi dan mempunyai perlawanan yang mempunyai kekuatan pendorong yang kuat agar norma/nilai yang ingin diperjuangkan dapat dengan mudah tercapai. Keeksistensian *La Via Campesina* sampai saat ini justru bisa dijadikan platform bagi semua gerakan yang ada untuk melawan upaya-upaya terstruktur yang memiliki tujuan memarjinalkan kelompok akar rumput seperti petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coen Husain Pontoh, "*Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global*", Resist, Yogyakarta, 2005.
- Hertz, Norena, *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global Dan Matinya Demokrasi*, Edisi Terjemahan, Alenia, Yogyakarta, 2005
- Little, Richard and Michael Smith, "*Perspectives on World Politic; Third Edition*", Routledge, New York, USA, 2006
- Sterling-Folker, Jennifer, "*Liberal Approaches in Making Sense of International Relations Theory*", Lynne Rienner Publisher, Inc, USA, 2006.
- Winner Agung Pribadi, "*Unfair Trade Dalam Free Trade: Standar Ganda Negara Maju Dalam Penerapan Agreement On Agriculture (AOA) WTO*", Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume II No. 1 Mei, 2005
- Veronika Sintha Saraswati *Korporasi Militer Swasta dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

Dari Internet :

- http://www.wto.org/english/docs_e/lega_l_e/14-ag.pdf. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 00.57wib
- http://interseksi.org/publications/essays/articles/gersos_islam.html. diakses pada 17 desember 2012 00.57wib
- http://www.wto.org/english/thewto_e/w_hatis_e/tif_e/fact2_e.htm. diakses pada 17 Desember 2012 pukul 01.21wib

[http://www.wto.org/english/thewto_e/w
hatis_e/tif_e/agrm3_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/w
hatis_e/tif_e/agrm3_e.htm).diakses
pada 17 Desember 2012 pukul
01.44wib

[http://www.globalautonomy.ca/global1/
glossary_entry.jsp?id=OR.0011](http://www.globalautonomy.ca/global1/
glossary_entry.jsp?id=OR.0011).
diakses pada 17 Desember 2012
pukul 01.21wib

[http://www.prakarsa-
rakyat.org/artikel/fokus/artikel.ph
p?aid=3706](http://www.prakarsa-
rakyat.org/artikel/fokus/artikel.ph
p?aid=3706) diakses tgl 9
Desember 2008

[http://viacampesina.org/en/index.php/or
ganisation-mainmenu-44](http://viacampesina.org/en/index.php/or
ganisation-mainmenu-44) diakses
pada 17 Desember 2012 pukul
01.21wib

[http://viacampesina.org/en/index.php/m
ain-issues-mainmenu-27](http://viacampesina.org/en/index.php/m
ain-issues-mainmenu-27) diakses
pada 16 Desember 2012 pukul
01.21

<http://www.ipb.ac.id/id/?b=264>

<http://nefos.org/?q=node/9> diakses tgl 9
Desember 2008.

Sumber lain :

Kumpulan bahan mata kuliah Ekonomi
Politik Global, dalam topik
bahasan "*Gerakan Liberalisasi di Amerika
Latin*", Program Pasca Sarjana Hubungan
Intenasional Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 2008.

Kumpulan bahan mata kuliah
Kosmopolitanisme dalam topik bahasan
"Social Movement" Program Pasca
Sarjana Hubungan Intenasional
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 2008.